



Menkes Beri Kepastian Pasien Kronis

{ 120.000 PBI JK Tetap Dilayani }

JAKARTA (KR) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan 120 ribu pasien penyakit katastropik (kronis) yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) namun terdampak pemutakhiran data tetap bisa mendapatkan penanganan dan layanan kesehatan.

Dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu (11/2), Budi menjelaskan, pihaknya sudah menyurati rumah sakit-rumah sakit untuk tetap memberikan penanganan bagi 120 ribu pasien tersebut.

Menkes mengatakan, di antara para pasien yang terdampak penonaktifan itu, ada yang perlu cuci darah, minum obat untuk stroke dan sakit jantung, butuh kemoterapi, hingga transfusi darah untuk talasemia. Menurutnya, penanganan bagi mereka

perlu tetap dilanjutkan, agar tidak terjadi fatalitas.

"Kami di Kementerian Kesehatan saya rasa sama seperti Komisi IX, fokus kita, kita tidak mau layanan kesehatan terutama bagi masyarakat kita yang berisiko ini berhenti sehari pun. Sehari pun," tegas Budi.

Ia menjelaskan, pasien-pasien itu nonaktif kepesertaan jaminan kesehatannya, karena ada perubahan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), di mana para pasien dikelompokkan

ke desil yang lebih tinggi yakni 6-10, yang dianggap lebih mampu. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) juga, supaya 120 ribu pasien penyakit katastropik itu serta rumah sakit tidak khawatir, bahwa penanganannya tidak dibayarkan.

"120 ribu pasien-pasien (penyakit) katastropik ini sudah disetujui pemerintah dan DPR segera di-reaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial," katanya.

Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan, selama tiga bulan di mana PBI JK direaktivasi untuk 120 ribu pasien, BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial dan pemerintah daerah

* Bersambung hal 9 kol 1

120.000

Sambungan hal 1

harus memperbaiki data 11 juta peserta PBI JK yang nonaktif kepesertaannya.

"Karena total yang berpindah itu ada 11 juta. Yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah

itu kita akan rapikan," katanya.

Padahal, kuota PBI JK adalah 96,8 juta orang. Sementara itu, sebanyak 1.824 orang terkaya, yang berada di desil 10, terdaftar sebagai peserta PBI JK.

Terkait reaktivasi, katanya, dengan biaya Rp 42 ribu per orang, untuk membayarkan 120 ribuan orang, bu-

tuh sekitar Rp 5 miliar. Selama tiga bulan, akan perlu Rp 15 miliar.

Budi menilai, jumlah itu tidak besar dan jangka waktu tiga bulan tidak terlalu lama, dibandingkan risiko kematian yang dihadapi para pasien penyakit katastropik apabila seminggu saja telat mendapatkan penanganan.

(Ant/Obi)-f

